

PERAN PROGRAM PENGEMBANGAN PETANI SEBAGAI
IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA
PT. SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER (SMGP) TERHADAP
RESISTENSI MASYARAKAT

Ahmad Taufik¹, Indra Lestari²

¹Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia,
E-mail: Taufik.ahmad45@gmail.com

²Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia,
E-mail: inle_bon@yahoo.co.id

Corresponding author:

E-mail: Taufik.ahmad45@gmail.com

Abstract

The presence of mining projects or power plants that exploit natural resources saves the potential for social and economic environmental problems for the community. The PT SMGP geothermal power plant project since 2010 has also experienced rejection from the community. Meanwhile, with the demand for energy sustainability in the midst of the fossil energy crisis, the government passed the 2014 Geothermal Law and the Omnibus Law hopes for the sustainability of geothermal energy projects with a Corporate Social Responsibility strategy. PT SMGP through the farmer development program hopes to support the project's sustainability without any disruption. This study aims to describe and analyze the role of the farmer development program as PT SMGP's CSR in dealing with community resistance. This study uses qualitative methods, with a total number of 12 informants. The data collection technique is through interviews with informants and documentation studies. As for being limited by the concept of CSR; Social Legitimacy Theory; Resistance, this research shows that the farmer development program as CSR of PT SMGP is effective in directly reducing farmer resistance. In addition, this CSR program indirectly contributes to providing a sense of the company's presence for the nearest village community so as to support the sustainability of the company's activities (social license operate).

Keywords: CSR implementation, farmer development program, resistance.

A. PENDAHULUAN

Energi baru serta terbarukan merupakan energi yang bersumber dari tenaga alam yang digunakan secara terus menerus dan berulang serta selalu diperbaharui namun ketersediaannya yang tidak pernah habis. Seiring dengan peningkatan konsumsi listrik nasional yang sangat drastis dan semakin berkurangnya ketersediaan bahan bakar fosil minyak dan gas, menjadi dasar pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri sektor energi terbarukan khususnya energi panas bumi (Asian Development Bank, 2020; Irena, 2017).

Menurut ESMAP (2012) menyatakan bahwa tantangan pengembangan panas bumi di Indonesia antara lain terbatasnya pembiayaan seperti insentif atau keringanan pajak dari pemerintah; biaya pengembangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan minyak gas dan batubara; lokasi potensi yang terpencil sehingga kurangnya dukungan jalan dan akuisisi lahan; penolakan sosial terhadap pengembangan panas bumi di Kawasan hutan dan konservasi, dll (ESMAP, 2012).

Lebih lanjut ditegaskan oleh BKF Kemenkeu (2020) bahwa resiko yang seringkali ditemui pengembang panas bumi antara lain kesulitan mengakuisisi lahan; proses perizinan yang sangat rumit serta protes dan penolakan dari masyarakat (Badan Kebijakan Fiskal, 2020). Penolakan dari masyarakat dipetakan Derizal (2017) antara lain ketakutan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan; berpengaruh buruk terhadap nilai dan norma hidup masyarakat; masyarakat merasa tidak akan mendapatkan manfaat langsung; tidak mau ikut dalam sosialisasi; kecurigaan permainan kepentingan kelompok atau elit politik; tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung baik dari pemerintah atau perusahaan serta lembaga *independent*; menjaga kepercayaan dan kearifan lokal; masyarakat merasa tidak mengerti mengenai tujuan perusahaan dan proyek; adanya sentimen nasionalisme terhadap investasi asing (Derizal, 2017).

Penolakan seringkali mengangkat persoalan sosial ekonomi dan lingkungan yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bentuk kekurangan energi panas bumi yang masih dianggap sama dan digolongkan pertambangan. Seperti halnya PT SMGP, untuk meredam konflik atau penolakan, banyak upaya yang dilakukan seperti sosialisasi intensif, melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang biasa disebut CSR sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Pasal 74 Tahun 2007. lebih spesifik, pelaksanaan kegiatan CSR diatur dalam Permen ESDM no.41 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Juga disempurnakan dalam permen ESDM no. 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan minerba, kepmen ESDM nomor 1824 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, permen ESDM no 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Dalam konteks penelitian ini, tergambarkan dalam UU No 21 Tahun 2014 dan Omnibus Law tentang Panas Bumi.

PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) melalui divisi CSR nya menggulirkan Program Pengembangan Petani melalui Lokakarya Pertanian Terpadu sebagaimana tercatat dalam dokumen perencanaan program mereka. Adapun intervensi yang dilakukan melalui 3 kegiatan, pertama dalam bentuk dukungan dan sponsorship kegiatan sektor pertanian yang diinisiasi murni dari masyarakat, kedua dalam bentuk lokakarya pertanian terpadu dan ketiga dalam bentuk kegiatan pendampingan jangka panjang (CSR Program Planning of 2013-2015).

Secara umum, beroperasinya sejumlah PLTP yang tersebar secara nasional menunjukkan bahwa penerimaan sosial dapat diupayakan oleh berbagai pihak khususnya dari pengembang itu sendiri baik itu dengan pendekatan hukum,

sosial, kultural dan ekonomi yang umumnya merupakan upaya tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan serta memastikan keberlangsungan proyeknya. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini antara lain, satu, bagaimana proses implementasi program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP, dua, bagaimana peran program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat?.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Social legitimacy theory menjelaskan CSR melalui pendekatan sosiologi. Menurut Garriga dan Mele (2004), pada teori ini, perusahaan dianggap sebagai integrasi dari masyarakat, sehingga perusahaan harus mengintegrasikan tuntutan masyarakat dalam bisnisnya. Jadi, selain menciptakan kekayaan dan memenuhi tanggung jawab secara hukum, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial yang diciptakan bisnis. Termasuk diantaranya adalah mematuhi nilai moral dan etika, mengambil keputusan yang menguntungkan masyarakat, dan melakukan aksi dermawan (*philanthropic*) kepada masyarakat. Artinya, CSR adalah tindakan perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan manfaat terhadap masyarakat. Menurut Warhurst (2001) melalui Prayogo (2013:17) Legitimasi atau keabsahan sosial bukan sekedar Licence to Operate melainkan lebih dari itu, sebuah “keabsahan sosial” atas kehadiran dan kegiatan perusahaan. Legitimasi sosial yang diberikan oleh komunitas lokal terhadap perusahaan tidak terlepas dari seberapa baik relasi yang terjadi diantara kedua entitas tersebut.

Implementasi CSR merupakan proyek-proyek yang perusahaan gunakan untuk mengintegrasikan CSR dalam organisasi perusahaan. Implementasi CSR

yang dirancang dengan baik dapat diwujudkan dalam proyek yang khusus yang secara spesifik dapat dikaitkan dengan perusahaan dan karenanya sulit untuk ditiru (Alfitri, 2011).

Prayogo pada tulisannya *Socially Responsible Corporation* mengungkapkan bahwa setiap jenis usaha yang berbeda memiliki jenis prioritas *stakeholder* yang berbeda pula. Industri Manufaktur lebih memiliki relasi yang signifikan dengan *stakeholder* tenaga kerja, industri jasa dan consumer goods lebih memiliki relasi yang signifikan terhadap *stakeholder* konsumen, sedangkan industri ekstraktif lebih memiliki relasi yang signifikan dengan komunitas lokal (Prayogo.2013:48). *Stakeholder* komunitas lokal menjadi penting untuk diperhatikan bagi industri ekstraktif karena konflik yang kerap terjadi pada perusahaan ekstraktif adalah konflik yang berkenaan dengan komunitas lokal. Selain itu, masyarakat atau komunitas lokal merupakan *stakeholder* yang memiliki kemungkinan besar terkena dampak perusahaan, seperti kehilangan tanah, mata pencaharian (Azheri.2012:113) atau polusi lingkungan.

Melihat begitu banyak dan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh konflik, pada masa modern ini korporasi sudah mulai menyadari pentingnya perhatian terhadap komunitas lokal, sebagai salah satu aspek yang dapat mempengaruhi keberlangsungan eksistensi korporasi, Selain itu, semakin banyak pula korporasi yang menyadari tanggung jawab sosial dari keberadaan usahanya di suatu tempat karena tanggung jawab sosial perusahaan dapat melahirkan keabsahan sosial berupa dukungan bahkan proteksi dari komunitas lokal kepada perusahaan itu sendiri (Prayogo 2011:11).

Adanya konflik, munculnya kesadaran dan juga dorongan berupa kewajiban dari pemerintah membuat korporasi berusaha membina hubungan baik dengan komunitas lokal sebagai salah satu *stakeholdernya*. Upaya ini dilakukan di

antaranya dengan menjalankan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk komunitas baik berupa pengembangan komunitas (CD) maupun bantuan langsung charity/philantrophy. Namun ternyata, upaya ini tidak selalu memberikan hasil yang baik bagi korporasi. Tidak jarang pula, konflik tetap terjadi meskipun program CSR kepada komunitas telah dilakukan. Berbagai cara dilakukan korporasi yang berjenis industri ekstraktif untuk mengambil hati komunitas lokal sebagai *stakeholder* utama mereka. Hanya saja, Pemberian program CSR yang bersifat relatif kurang tepat bisa mengakibatkan program CSR menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau kebutuhan komunitas lokal. Hal tersebut dapat berimplikasi pada legitimasi sosial yang diberikan oleh komunitas lokal terhadap korporasi.

Prayogo (2011:191) yang mengatakan bahwa Implementasi CSR adalah Langkah konkret menerapkan program kegiatan yang telah dirumuskan. Kemudian Penulis menggaris bawahi poin penting mengenai definisi konsep implementasi CSR, yakni bagaimana ide dari pihak korporasi yang awalnya hanya berada pada tataran diskursus berubah menjadi tataran operasional dan turun kebawah dan masuk pada tataran praktis.

Secara definisi konseptual, definisi implementasi CSR yang penulis gunakan mengacu pada Prayogo dalam bukunya *Socially Responsible Corporation* seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian secara definisi operasional, definisi implementasi CSR yang penulis gunakan mengacu pada Prayogo (2014 :10) yang berjudul “*Guideline for the execution and evaluation CSR programs of mining, oil, and gas Corporation*” dijelaskan secara terperinci mengenai bagaimana pengukuran implementasi CSR yang didalamnya memiliki memiliki beberapa dimensi. Namun karena implementasi CSR dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang masyarakat atau komunitas lokal maka dimensi-dimensi berikut dilihat dari

pandangan komunitas lokal terhadap persiapan, pelaksanaan, monitoring.

Alvin Zander (1950) mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai perilaku yang bertujuan untuk melindungi seseorang dan dampak perubahan, baik yang nyata maupun tidak (Dent & Goldberg, 1999). Sedangkan, Zaltman dan Duncan (1977) mengartikan resistensi sebagai berbagai bentuk perbuatan yang menyebabkan keberlangsungan sesuatu dalam kondisi tekanan menuju perubahan (Zaltman & Duncan, 1977). Folger & Skarlicki mendefinisikan resistensi sebagai perilaku yang berusaha menentang, merusak atau memutar balikkan asumsi, diskursus dan relasi kekuasaan yang dominan (Bolognese, 2002).

Terkait dengan resistensi terhadap perubahan, Stephen P. Robbins (2008) menyebutkan tiga jenis resistensi dalam konteks organisasi. Pertama, resistensi yang terang-terangan dan segera. Kedua, berupa keluhan yang diperlihatkan dan dalam tindakan pekerjaannya. Dan ketiga, resistensi yang tersamar berupa penolakan yang diindikasikan dengan hilangnya loyalitas anggota, peringatan atas kesalahan atau kesalahan itu sendiri (Robbins & Judge, 2008).

Jadi, resistensi dalam masyarakat adalah adanya 'perlawanan' (baik diam diam atau terang-terangan) terhadap suatu kebijakan yang diterbitkan satu pihak yang dinilai berdampak negatif pada pihak lain. Dalam resistensi masyarakat ini, masyarakat dilihat sebagai suatu organisasi, yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Resistensi masyarakat ditunjukkan dapat berupa unjuk rasa, perusakan fisik, maupun perlawanan hukum dari masyarakat. Dalam konteks perubahan, menurut Kotter dan Schlesinger (1979), terdapat empat alasan orang yang menolak perubahan, yakni:

- a) Mementingkan diri sendiri (*Parochial self-test*). Beberapa orang hanya

memikirkan kepentingannya sendiri bukan kepentingan yang lebih besar.

- b) Kesalahpahaman (*Mindestag*). Termasuk kategori ini adalah masalah komunikasi dan minimnya informasi.
- c) Toleransi untuk berubah rendah (*Low tolerance to change*) - beberapa orang sangat tertarik untuk keamanan dan stabilitas di dalam pekerjaan mereka.
- d) Penilaian yang berbeda dari situasi (*Different assessments of the situation*). Beberapa orang tidak setuju alasan perubahan, termasuk mengenai kelebihan dan kekurangan dan proses perubahan.

Kotter dan Schlesinger (1979), selanjutnya menetapkan enam (6) pendekatan dalam meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Pendekatan ini dijalankan sesuai tingkat resistensinya.

- a) Pendidikan dan komunikasi.
- b) Partisipasi dan keterlibatan
- c) Dukungan dan fasilitasi
- d) Negosiasi dan perjanjian
- e) Manipulasi dan kooptasi/taktik politik
- f) Pemaksaan implisit dan eksplisit

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis tujuan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui deskriptif kualitatif akan tersaji gambaran yang spesifik mengenai situasi sosial yakni bagaimana gambaran pelaksanaan program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kab Mandailing Natal, Provinsi

Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2022 hingga Mei 2022. Penentuan lokasi berdasarkan pada pertimbangan bahwa Kab Mandailing Natal menjadi salah satu kabupaten yang menghasilkan panas bumi dengan rentetan konflik yang menyertainya.

Jenis sampling menggunakan teknik *nonprobability sampling* yang berfokus pada pemilihan informan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian dan merupakan representasi/mewakili dari populasi yang dikaji (Neuman, 2013). Selanjutnya teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive* atau *judgemental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan tahap analisis data yang terdiri dari *sort and classify* (menyortir dan mengklasifikasi data), *open coding* (pengkodean secara terbuka), *axial coding* (penyandingan aksial), *selective coding* (penyandingan selektif) dan terakhir *interpret and elaborate* (interpretasi dan elaborasi).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data

Profil PT. SMGP

KS Orka Renewables PTE Ltd (KS Orka), sebuah perusahaan energi asal China memasuki industri energi Indonesia pada tahun 2016 dengan mengakuisisi proyek 240 MW Sorik Marapi Geothermal di Mandailing Natal, Sumatera Utara dari PT Origin Tata Power Geothermal Services Indonesia yang sudah berada semenjak tahun 2010. KS Orka masuk untuk mengakuisisi 95% sahamnya pada April 2016 dan menyelesaikan transaksi pada pertengahan Agustus 2016. Di bawah manajemen baru, PT Sorik Marapi Geothermal Power memulai pengeboran eksplorasi pertamanya pada tanggal 15 Oktober 2016 dan pada Juni 2017, dan

sampai saat ini PT SMGP sudah pada tahap produksi listrik. Merujuk pada legalitas yang telah dimiliki oleh perusahaan lebih dari 40an, maka secara prinsip kegiatan Pemboran Eksplorasi panas bumi ini punya kekuatan hukum untuk dilakukan. Selain izin besar seperti izin usaha panas bumi, izin lingkungan, perusahaan juga telah mendapatkan izin lain yang bersifat teknis seperti Izin HO, Izin penggunaan air permukaan, dan lain- lain.

Dampak Kehadiran Perusahaan atau Proyek PLTP

Berdasarkan hasil wawancara, Adapun dampak kehadiran perusahaan yang dirasakan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2, antara lain dampak positif dan dampak negatif, selain itu juga terungkap potensi masalah yang jadi pusat perhatian masyarakat. PT SMGP melalui departemen CSR nya melakukan pencatatan, pengumpulan serta pengelolaan keluhan masyarakat yang terdokumentasi secara administrasi. Berikut olahan data yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 1 penolakan yang terdokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengidentifikasi waktu terjadinya resistensi dimulai semenjak tahap eksplorasi, yang berkisar semenjak tahun 2011 sampai pada puncaknya pada tahun 2015 semenjak terjadinya kerusuhan antara pihak yang kontra dan pihak pendukung perusahaan yang menyebabkan meninggalnya salah satu pemimpin adat dari pihak pendukung perusahaan dan ditangkapnya salah satu provokator. Setelah tahun tersebut, resistensi sudah mulai berkurang seiring dengan aktivitas perusahaan yang sudah mulai berjalan dengan lancar sampai memasuki tahap produksi pada tahun 2019.

Tabel 4. Jumlah Penolakan yang terdokumentasi

Kategori Keluhan	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kerusakan lahan dan properti masyarakat	0	0	2	0
Proses pembebasan lahan	0	13	163	15
Kerusakan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir; longsor; kerusakan irigasi; kerusakan jalan masy/jalan perkebunan masy, dll	0	0	1	0
Peluang kerja	1	2	3	4
Program CSR	28	16	18	0
Sosial; budaya; hubungan kemasyarakatan	0	2	26	4
Komunikasi	48	28	3	0
Total	77	61	216	23

Sumber: Departemen CSR, PT SMGP (2022)

Selain itu, hasil wawancara juga mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghadapi resistensi, antara lain:

1. Perusahaan melakukan sosialisasi yang berulang dan terus menerus ke berbagai pihak, mulai dari level desa sampai kabupaten.
2. Mengajak perwakilan pemerintahan desa, tokoh masyarakat, camat, serta perwakilan pemkab melakukan studi banding ke Sibayak, Kamojang, lokasi PLTP yang sudah berhasil berproduksi.
3. Melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat melalui pertemuan di warung kopi sepulangan dari studi banding.
4. Melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk dukungan acara social keagamaan ataupun di bidang pendidikan serta pertanian

Program pengembangan petani yang awalnya dicanangkan untuk mendukung keberlangsungan proses pembebasan lahan yang berdampak terhadap lahan pertanian, agar tidak mendapatkan penolakan dari para petani di desa, justru dirasa tepat dirasakan oleh petani yang merupakan peserta program pengembangan petani, dirasakan tepat efektif menciptakan kemandirian bagi petani, merasa tidak tergantung kepada perusahaan sebagai pekerja sehingga

tidak menolak kehadiran perusahaan dan justru merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan.

Sosialisasi yang dilakukan PT SMGP

Sebagai upaya pendekatan yang dilakukan oleh PT SMGP kepada pemangku kepentingan khususnya untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, dapat disimpulkan PT SMGP melakukan beberapa strategi, antara lain:

1. Bercengkrama dan berinteraksi dengan masyarakat di warung warung kopi; pesta; acara kemalangan dan kematian masyarakat
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan tokoh kunci dari unsur unsur masyarakat
3. Melakukan pertemuan formal dan informal di setiap sebelum dan sesudah kegiatan perusahaan dilakukan
4. Menginformasikan setiap rencana kegiatan kepada masyarakat baik secara formal dan informal, baik di tingkat Kabupaten; Kecamatan dan Desa
5. Melakukan kampanye tentang manfaat dan pentingnya energi panas bumi melalui kegiatan distribusi merchandise baju; jam dinding; handuk; jaket; dll.
6. Mendukung dan berpartisipasi di setiap kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan di tingkat desa; kecamatan; kabupaten dan provinsi.

Sosialisasi dinilai sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh PT SMGP dalam menghadapi resistensi, sebagaimana penjelasan diatas ditegaskan melalui hasil wawancara. Rangkaian sosialisasi yang dilakukan perusahaan sudah mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kehadiran perusahaan dengan segala bentuk aktivitas dan potensi dampaknya. Namun, ada pihak diluar

desa terdekat perusahaan yang membuat gerakan gerakan provokasi dan penolakan yang terus menerus, dengan berbagai cara seperti intimidasi, menyebar ketakutan, penyerangan, dll, sehingga eskalasi resistensi semakin besar dan serius.

Implementasi Program Pengembangan Petani

Program Pengembangan Petani Sebagai CSR PT SMGP dicanangkan pada tahun 2013, dengan mempertimbangkan latar belakang sebagai berikut:

1. Kabupaten Madina memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah, namun kapasitas teknis penduduk setempat masih kurang.
2. Hasil observasi lapangan tim CSR PT SMGP (selama februari 2013) menegaskan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah proyek adalah petani padi, karet, kakao dan hortikultura. Namun, pengamatan awal menyoroti bahwa sebagian besar petani bekerja dengan pendekatan tradisional dan mewarisi pengetahuan serta keterampilan yang tidak lagi sesuai dengan kualitas lingkungan yang berubah. Selain itu, kurangnya kegiatan agroekonomi berbasis kelompok yang menyebabkan proses produksi pertanian tidak efisien. Ini semua, sebagian besar, telah membuat produksi pertanian turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini diperparah dengan kelangkaan bantuan teknis pertanian dari pemerintah daerah, yang menyebabkan lambatnya pembangunan di seluruh sektor. Ada kelompok tani di desa-desa, namun umumnya tidak aktif atau didirikan hanya bertujuan mendapatkan keringanan dalam menggarap sawah, membuka lahan, atau niat untuk menerima bantuan natura (bibit atau pupuk kandang) dari pemerintah.

3. Sejak ada sosialisasi oleh Tim CSR tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan rencana pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, mulai banyak permintaan dari petani atau kelompok tani di desa binaan untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan dalam hal bantuan teknis di bidang pertanian atau bantuan modal.

Berdasarkan penelusuran dan analisa dokumen primer seperti laporan harian informan; laporan kegiatan serta hasil wawancara, implementasi program pengembangan petani secara umum dikelompokkan dalam tiga bentuk, antara lain:

1. Lokakarya pemberdayaan dan pertanian terpadu dalam sesi kelas dan lapangan
2. Praktek lapangan dan pendampingan
3. Dukungan pendanaan dan peralatan serta perlengkapan pertanian kebutuhan kelompok.

Lokakarya Pertanian Terpadu

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk meletakkan dasar bagi petani untuk memahami dan menilai kebutuhan nyata mereka dalam pertanian terpadu. Kemampuan untuk menilai kebutuhan nyata seperti itu akan membantu mereka mengembangkan pilihan yang tepat sasaran dalam kegiatan pertanian yang sesuai dengan aset dan lingkungan lokal. Tujuan langsung dari lokakarya ini adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kelompok dan motivasi diri;
2. Untuk membangun pengetahuan tentang praktek dan manajemen pertanian

terpadu;

3. Mengembangkan analisis situasi dan kebutuhan yang menghasilkan potensi peserta dan pilihan kegiatan program masyarakat dalam pertanian terpadu;
4. Mengembangkan rencana aksi peserta yang berorientasi pada kegiatan program pertanian terpadu jangka panjang;

Secara sederhana dan teknis, pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas petani melalui pendekatan pemberdayaan. Pendekatan tersebut dipandang strategis karena berorientasi kepada prinsip kerja: 1) Optimalisasi potensi lokal; 2) Partisipasi aktif; 3) Edukasi, keterampilan dan sikap bertani; 4) Rasa memiliki; 5) Bertani untuk tujuan kesejahteraan yang lebih luas termasuk untuk mendukung program kesehatan/peningkatan gizi keluarga; dan 6) Kemandirian

a. Persiapan Lokakarya Pertanian

Lokakarya berlangsung setelah dilakukan konsolidasi dan persiapan terakhir terhadap seluruh hal yang terkait dengan lokakarya termasuk pengecekan lokasi lokakarya dan lokasi praktek di Desa Hotalombang. Hasil konsolidasi adalah sebagai berikut:

1. Diketahui mengenai aturan main penggunaan fasilitas dari PT SMGP
2. Disepakati alur lokakarya selama enam setengah hari dengan empat pokok bahasan dan 18 sub pokok bahasan.
3. Disepakati teknis kerjasama antara fasilitator dengan Panitia termasuk tugas untuk konsumsi, perekam proses dan semua hal yang berkaitan dengan tujuan lokakarya.
4. Disepakati seluruh alat dan bahan yang akan digunakan selama lokakarya,

Sampai pada akhir lokakarya, petani yang menjadi peserta aktif sebanyak 24 orang. Mereka adalah perwakilan dari enam desa yakni: Desa Hutalombang, Mago Lombang, Hutanamale, Purba Lamo, Sibanggor Tonga, dan Sibanggor Julu.

Tim fasilitator utama pada lokakarya ini adalah dari QMM (Qima Mulia Madani). Selanjutnya untuk panitia yang bertanggungjawab atas kegiatan ini adalah tim CSR PT SMGP. Fasilitator pendukung lainnya adalah NS (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Mandailing Natal) dan Sap (Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Mandailing Natal).

b. Pendampingan Kelompok Tani

Pendampingan kelompok tani yang dilakukan oleh PT SMGP dijabarkan dalam 3 periode waktu, antara lain:

1) Sebelum diadakannya Lokakarya Pertanian Terpadu.

Pada pendampingan kelompok pada periode ini tercatat ada 3 kali pertemuan antara perwakilan CSR PT SMGP bekerjasama dengan penyuluh pertanian kabupaten dengan kelompok kelompok tani di lingkaran desa PT SMGP. Adapun tujuan pendampingan dalam bentuk pertemuan tersebut antara lain menggalang masalah yang umum ditemui oleh kelompok dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang dapat direalisasikan oleh perusahaan demi memberdayakan kelompok di bidang pertanian. Di setiap pertemuan dan pendampingan ke lapangan, rata-rata petani yang hadir berkisar puluhan orang. Adapun topik pembicaraan antara lain terkait tanaman yang cocok untuk ditanam di wilayah desa atau lahan mereka sesuai dengan kondisi cuaca, kualitas tanah dan kebutuhan pasar. Selain itu, juga membahas terkait hama tanaman yang seringkali merusak tanaman pertanian mereka.

Berdasarkan pertemuan dan pendampingan tersebut, menguatlah aspirasi para petani untuk mendapatkan dukungan pelatihan dari PT SMGP dalam memajukan usaha pertanian secara berkelompok. Lebih lanjut, dirasakan besarnya kebutuhan mereka tentang bagaimana mengelola kelompok, mengelola lahan pertanian, membuat pupuk organik, upaya penanggulangan hama serta tata cara teknis pertanian yang tepat dan baik.

2) Setelah diadakannya Lokakarya Pertanian Terpadu.

Pada periode waktu ini, tercatat ada 14 kali pertemuan, kunjungan lapangan dalam rangka mendampingi 2 kelompok tani yang terbentuk hasil Lokakarya Pertanian Terpadu. Dalam rentang waktu antara bulan September sampai Desember tahun 2013 ini, CSR PT SMGP bersama penyuluh pertanian kabupaten berhasil mendampingi kelompok dalam mengaplikasikan ilmu dan praktek lapangan yang didapatkan selama Lokakarya Pertanian Terpadu.

Adapun kendala yang dirasakan oleh kelompok yang dijumpai selama proses pendampingan antara lain, curah hujan yang tinggi, kesulitan air mengalir untuk irigasi bedengan, beberapa kali tanaman kelompok dicuri oleh orang lain, merasa kurangnya modal untuk pemupukan, kecemburuan besaran tugas antar anggota, kurang disiplinnya beberapa anggota kelompok, dll. Namun, dengan proses pendampingan tersebut, kelompok berhasil menemukan solusi di setiap masalah yang dihadapi, sehingga secara alami timbulnya kesepakatan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab, pencatatan kas yang transparan, timbulnya kepercayaan diri, semangat, kekompakan kelompok ditengah banyaknya masyarakat lain yang gagal panen tanaman tomat ataupun cabe, serta adanya keinginan yang kuat untuk menambah ilmu melalui pelatihan lanjutan, menambah membuka lahan baru, melakukan studi banding secara

mandiri ke sentra pertanian di daerah lain. Selain itu, kelompok juga punya banyak inisiatif dengan bekerjasama dengan perusahaan produk pertanian, koperasi dalam hal pinjaman pendanaan.

3) Setelah diadakannya Pelatihan Pertanian Lanjutan.

Pada periode pasca pelatihan pertanian lanjutan, tercatat 25 kali tim CSR PT SMGP bersama penyuluh pertanian kabupaten melakukan pendampingan kepada 2 kelompok tani binaan dalam rentang waktu dari Desember 2013 sampai November 2014.

Adapun bentuk aktivitas yang dilakukan bersama kelompok selama proses pendampingan antara lain kegiatan teknis pertanian seperti penanaman bibit cabe/kol; penyemprotan gulma; pembersihan lahan; pemupukan; pemangkasan daun kering; pengisian Polybag; pemeliharaan tanaman; pembersihan sanitasi lahan; pemasangan batang ajir; perempelan tanaman, penyemprotan; penyiraman dan pembersihan bedengan; penanaman bibit; pembuatan lubang tanam; pemupukan; penyemprotan hama tanaman; panen.

Selain itu, setiap proses pendampingan, tim CSR PT SMGP selalu memberikan sesi penguatan kelompok seperti refreshing pengetahuan pasca pelatihan; diskusi berbagi masalah pribadi dan kelompok; penguatan komitmen dan peraturan kelompok; penguatan kembali rencana kerja kelompok; saling memberi motivasi; dll.

Seiring dengan proses pendampingan yang terus berjalan, kuatnya kepemimpinan ketua kelompok; serta saling terbuka, masalah dan kendala yang dihadapi kelompok teratasi dengan sendiri nya melalui proses penguatan kelompok baik itu dalam bentuk berbagi masalah dan menawarkan solusi;

penguatan peraturan kelompok dalam bentuk denda serta saling mengingatkan dan memberi teladan, dll kelompok masih semangat untuk menjalankan usaha pertanian cabe dan tomatnya, hal ini dibuktikan dengan keseriusan anggota kelompok dalam menjaga sanitasi lahan; seringkali berkonsultasi dengan penyuluh pertanian dan fasilitator lokakarya pertanian dan pertanian lanjutan yang diadakan oleh perusahaan sebelumnya. Sehingga, perjuangan kelompok membuahkan hasil, selama periode pendampingan ini kelompok merasa berhasil karena merasa untung ditengah harga cabe yang juga sedang mahal,

Selain itu, kelompok juga menyampaikan bahwa untuk lahan kelompok yang hanya 2 pantak (578 m²) tanaman tomat mereka mendapatkan hasil yang memuaskan setara dengan hasil Rp 5.546.000.00 dengan modal utama sekitar Rp 800.000. Karena keberhasilan proses pendampingan kelompok ini, kelompok tani Mandiri Sejahtera dan Hortalombang ini menarik minat salah satu perusahaan pembibitan untuk bekerjasama dan terbuka peluang untuk pencarian dana permodalan untuk pengembangan lahan pertanian dengan koperasi; dukungan pemerintah daerah dan KUR BRI dan Bank Sumut.

Kendala-kendala yang dirasakan dalam implementasi program pengembangan petani

Dengan mempertimbangkan rencana awal program, banyaknya rangkaian kegiatan program serta lamanya rentang waktu implementasi program, ada beberapa hal kendala yang bisa ditangkap, antara lain:

1. Seringkali tujuan kegiatan yang dirumuskan dalam implementasi program diarahkan untuk menjawab atau sebagai solusi atas suatu permasalahan social lainnya
2. Keterbatasan jumlah anggota tim CSR perusahaan dengan tingginya agenda

tugas lainnya sehingga seiring dengan perjalanan nya, banyak implementasi kegiatan yang tertunda atau tidak maksimal

3. Sering terjadinya pergantian pimpinan CSR dan personil, sehingga ada beberapa alur pelaksanaan program dimodifikasi sesuai dengan penafsiran personil yang diberikan tanggungjawab
4. Seiring dengan kebutuhan keberlanjutan aktivitas perusahaan, implementasi program sarat dengan intervensi dari beberapa pemangku kepentingan yang memiliki agenda kepentingan dan tujuan lainnya
5. Semenjak tahun 2015, seiring dengan tingginya aktivitas perusahaan terkait konstruksi proyek, mulai dirasakan menurunnya intensitas pendampingan kelompok seperti halnya harapan dan rencana awal program ditetapkan bahwa kunci keberhasilan program adalah pendampingan.

Manfaat yang dirasakan dari implementasi program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP

Berdasarkan telaah penjabaran implementasi program, dan intisari dari ekspresi dan pandangan hasil wawancara terhadap implementasi program, ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh peserta program, antara lain:

1. Peserta merasa mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berkesan di setiap kegiatan sehingga secara langsung mendukung pemahaman dan kemampuan petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya
2. Peserta berpandangan bahwa program yang diinisiasi dan dikembangkan oleh PT SMGP secara tidak langsung menumbuhkembangkan kelompok kelompok pertanian baru sebagai role model bagi kelompok tani dan masyarakat secara umum

3. Peserta merasa bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya pada periode pendampingan menjadi bekal yang kuat untuk kemandirian kelompok sehingga sudah tidak punya pemikiran lain untuk mencari pekerjaan sebagai pekerja atau karyawan perusahaan
4. Disisi lain, secara tidak langsung, program ini efektif dan bermanfaat bagi anggota masyarakat yang tidak terserap bekerja dalam aktivitas perusahaan sehingga berbagai unsur masyarakat merasakan kehadiran perusahaan

2. Pembahasan

Implementasi Program Pengembangan Petani Sebagai CSR PT SMGP

Prayogo (2013) dalam *"Guideline for the execution and evaluation CSR programs of mining, oil, and gas Corporation"* dijelaskan secara terperinci mengenai bagaimana pengukuran implementasi CSR yang didalamnya memiliki memiliki beberapa dimensi diantaranya mengenai persiapan, pelaksanaan, pengawasan. Pada penjelasan mengenai persiapan (Prayogo, 2013b), PT SMGP menggambarkan adanya beberapa kali pertemuan dengan perwakilan petani (3 Mei 2013), pemerintahan desa serta perwakilan kelompok tani dalam rangka analisis kebutuhan pelatihan pertanian. Dalam pertemuan tersebut digali harapan dari para petani, minat dan motivasi serta tujuan mereka ikut dalam program pengembangan petani yang akan dicanangkan oleh PT SMGP. Dalam pertemuan tersebut juga menentukan perwakilan dari masyarakat dan petani dalam kepanitiaan staf pelaksana program. Selanjutnya, juga dalam pertemuan terpisah, adanya suatu pertemuan yang mengkonsolidasi perwakilan dari masyarakat dan petani sebagai staff pelaksana bersama dengan perwakilan perusahaan dan fasilitator salah satu kegiatan pelatihan. Selain itu, seiring dengan jalannya program pengembangan petani, PT SMGP juga berusaha mencari sumber daya lain dan mitra dalam rangka mendukung program ini antara lain Bank Daerah,

Balai Penyuluhan Pertanian kabupaten dan Provinsi, serta melakukan sosialisasi dan permohonan dukungan kepada dinas pertanian dan perindustrian kabupaten Mandailing Natal.

Adapun rangkaian pelaksanaan program pengembangan petani dijelaskan secara terperinci baik itu dari segi persiapan, pelaksanaan, bahkan evaluasi dari setiap kegiatan. Dari sisi pelaksanaan, program pengembangan petani ini sudah disosialisasikan kepada beberapa desa dan *stakeholders* terkait dalam rangka menyusun rencana program yang berpotensi memiliki tingkat partisipasi yang banyak dari para petani. Dan di setiap tahap kegiatan, PT SMGP selalu memberikan peluang kepada berbagai pihak untuk mengevaluasi dan memberikan masukan rencana tindak lanjut, khususnya dari pihak petani. Rencana tindak lanjut inilah, menjadi dasar bagi tim CSR PT SMGP untuk melakukan pengawasan sehingga mendorong keberlanjutan di setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun dari sisi pengawasan, pada penjelasan implementasi kegiatan, jelas sekali bahwa di setiap kegiatan PT SMGP bersama sama petani menentukan target keberhasilan, menentukan harapan harapan sebelum dilakukan, mengidentifikasi kendala kendala yang dirasakan, mendukung dan mencari solusi pemecahan permasalahan serta menentukan rencana tindak lanjut yang harus dicapai. Dalam penjelasannya, jelas sekali proses pelaksanaan program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP ini sangat kental bernuansa pemberdayaan.

Peran Program Pengembangan Petani Sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat

Pada awal hadirnya PT SMGP di Mandailing Natal pada tahun 2010, pemimpin daerah sebelum dan yang menjabat pada saat itu sangat mendukung kehadiran perusahaan ini. Mereka meyakini dan ikut mengajak masyarakat mendukung kehadiran PT SMGP. Sejalan dengan dukungan pemerintah daerah, PT SMGP juga gencar melakukan sosialisasi kehadiran perusahaan dan sosialisasi mengenai proyek kepada masyarakat di 3 kecamatan. Selain itu, PT SMGP juga gencar melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat walaupun perusahaan pada saat itu belum melakukan kegiatan apapun di lapangan. Namun semenjak tahun 2013, seiring dengan perpindahan kekuasaan karena adanya kasus korupsi di pemerintahan daerah kabupaten Mandailing Natal, ketidakstabilan politik daerah saat itu, berdampak pada perusahaan sementara perusahaan pada saat itu sudah mulai melakukan aktivitas proses pengadaan lahan. Seiring dengan mulainya aktivitas perusahaan tersebut juga lah, di beberapa desa mulai adanya gerakan penolakan yang diinisiasi oleh seseorang yang memiliki latar belakang sebagai mantan mahasiswa, anggota dari salah satu organisasi kepemudaan, dan bekerja sebagai 'aktor bayaran' di setiap demo yang terjadi di Mandailing Natal.

Gerakan penolakan di mulai dari 2 desa terjauh namun masih dalam lingkup 3 kecamatan terdampak PT SMGP. Desa pertama adalah desa yang juga tempat tinggal provokator saat itu, dan desa kedua adalah suatu desa yang dekat dengan pasar dan jalan lintas sumatera. Adapun gerakan yang mereka lakukan adalah melakukan musyawarah pada kelompok kecil terutama pemuda di dua desa tersebut. Melakukan doktrinisasi penolakan terhadap PT SMGP dengan alasan yang menyebarkan ketakutan dan dikaitkan kaitkan dengan SARA.

Selain itu, untuk memperbesar gerakan penolakannya, kelompok ini menyebarkan ketakutan kepada desa-desa lain melalui distribusi sebuah video yang sudah di edit dan dimodifikasi yang berisi pesan bahwa geothermal di suatu wilayah di Indonesia timur menyebabkan kekeringan, berpotensi terhadap gempa dan lumpur seperti Lapindo. Penyebaran ini semakin diperkuat dengan aksi kelompok yang membuat rusuh di setiap pelaksanaan sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan di beberapa desa lainnya. Lebih lanjut dalam penelitian Hariyadi secara komprehensif menjelaskan dinamika penerimaan sosial terhadap pengembangan masyarakat ditentukan oleh aspek-aspek sistem kehidupan sosial budaya. Dampak negatif biasanya lebih menonjol sehingga mendorong pandangan masyarakat bahwa pengembangan PLTP akan selalu merugikan masyarakat (Hariyadi, 2019). Dalam konteks beragamnya sistem sosial budaya, lemahnya dukungan atau penerimaan sosial tersebut diakibatkan oleh rasa takut, ketidak-tidaknya dari sisi fisik, suara yang ditimbulkan, potensi terjadinya gempa, dan luasan atau besarnya infrastruktur yang dibangun (Hariyadi, 2019).

Selain itu, untuk memperkuat gerakan nya, kelompok yang menolak kehadiran perusahaan ini mulai memecah belah desa lain dengan melakukan pendekatan kepada para pemilik lahan, mendata orang-orang yang vocal dan pemilik lahan yang sudah menjual lahannya kepada perusahaan. Mereka juga mulai menyebarkan ketakutan dan intimidasi kepada masyarakat desa lain dengan cara menciptakan rumor akan ada penyerangan kepada orang-orang yang mendukung perusahaan, membakar kebun dan pondok orang-orang yang mendukung perusahaan, melempari rumah orang-orang yang mendukung perusahaan di malam hari, dan mendesak para tokoh adat dan agama untuk mengusir orang-orang mendukung perusahaan khususnya yang bekerja pada perusahaan, yang menjual

lahan ke perusahaan dan tidak mengikutsertakan dalam kegiatan kegiatan desa dan tidak ikut dalam penyelenggaraan jenazah keluarga orang orang yang mendukung perusahaan.

Seiring dengan gerakan diatas, mereka juga mulai membuat kalimat kalimat penolakan di dinding dinding desa, memasang spanduk di titik titik strategis di desa dan lintas Sumatera. Lebih lanjut, mereka mulai merutinkan penyelenggaraan pengajian akbar di setiap desa yang selalu dilanjutkan dengan pengucapan komitmen bersama melalui sumpah, doa dan surat kesepakatan menolak keberadaan perusahaan.

Seiring dengan upaya perusahaan untuk membendung penolakan melalui sosialisasi intensif dan kegiatan CSR, gerakan kelompok tersebut semakin massif semenjak tahun 2013, apalagi semenjak terbitnya UU Panas Bumi Tahun 2014, dan salah satu isi undang undang tersebut adalah berpindahnya kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin panas bumi ke pemerintah pusat. Pada fase ini, adanya indikasi bahwa rangkaian penolakan dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu sebagaimana yang juga terungkap dari hasil wawancara alasan dan penyebab penolakan. Hal ini seakan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Diwasasri (2018) yang mendeskripsikan analisis faktor faktor hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi dalam periode waktu dari tahun 2010 sampai 2017 yang salah satunya faktor desentralisasi (Diwasasri, 2018). Pemerintah daerah melihat panas bumi bukan proyek yang menguntungkan daerah secara langsung, karena membutuhkan tahapan yang panjang, antar daerah dan pusat belum tentu memiliki kesamaan pandangan dalam melihat urgensi panas bumi.

Selain itu, hal ini juga bisa dilihat dalam perspektif konflik menurut prayogo karena semua faktor yang diungkap oleh prayogo terpenuhi dan dapat dijelaskan

dari penolakan yang terjadi terhadap PT SMGP (2008:16), konflik dapat dilihat sebagai sebuah proses sosial yang dianalisis melalui tiga dimensi sebab, dinamika, dan resolusi. Konflik sosial tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan terdapat faktor-faktor penyebabnya dan disertai oleh indikasi awal. Suatu resolusi konflik dapat dikembangkan jika bergantung pada aktor yang terlibat dalam penentuan penyelesaiannya (Prayogo, 2008). Aspinal dan Feally (dalam Prayogo 2008:22) juga menyebutkan bahwa munculnya resistensi masyarakat terhadap pemerintah atau suatu korporasi disebabkan oleh adanya perubahan struktur politik akibat terjadinya transisi politik.

Semenjak tahun 2014 tersebut, gerakan penolakan sudah mulai mengarah pada aksi demonstrasi yang rutin, dimulai kepada pemerintah daerah, aksi pemblokiran jalan lintas sumatera, demonstrasi di kantor PT SMGP, dan aksi demonstrasi yang berujung penyerangan kepada pekerja perusahaan dan penyerangan kepada anggota masyarakat yang mendukung dan pekerja perusahaan. Prayogo (2008:24) melihat dinamika dalam konflik antara masyarakat lokal dengan korporasi tambang begitu kompleks, sehingga tidaklah sama dengan dinamika dalam konflik antar etnis atau agama. Karakteristik dalam dinamika resistensi pada kasus ini terpenuhi atau dijelaskan dari semua variabel yang dimaksud prayogo, yaitu fluktuasi konflik, intensitas konflik, eskalasi, dan bentuk konflik, aktor atau lembaga serta karakteristik lokal yang terlibat baik sebagai pendorong maupun peredam konflik. Aktor yang dimaksud dalam hal ini adalah para elite lokal, tokoh adat, preman, atau individu yang signifikan. Selain lima variabel di atas, kuat-lemahnya konflik juga dapat ditentukan oleh seberapa banyak lembaga yang terlibat atau adakah kompetisi dan/atau kolaborasi antarlembaga dalam konflik tersebut yang nantinya akan menyebabkan timbulnya konflik kepentingan (Prayogo 2008:26).

Dan mencapai puncaknya pada tahun 2015, terjadi kerusuhan antara kelompok yang menolak kehadiran perusahaan dengan masyarakat yang mendukung perusahaan yang menyebabkan meninggalnya salah satu tokoh adat pemimpin kelompok yang mendukung kehadiran perusahaan. Semenjak kejadian tersebut, aparat keamanan sudah mulai melakukan upaya pengamanan dan penangkapan orang-orang yang dianggap provokator, dan semenjak kejadian tersebut, perlahan-lahan gerakan penolakan di desa semakin berkurang seiring dengan mulai lancarnya aktivitas perusahaan di lapangan. Lebih lanjut menurut Prayogo, resolusi konflik merupakan solusi terbaik dari konflik yang terjadi dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bentuk resolusi yang digunakan sebagai penyelesaian akhir dari suatu konflik sangat ditentukan oleh peran negara, dalam hal ini dengan hadirnya hukum atau aparat keamanan.

Mengacu kepada pendapat Bolognese (2002) dalam Fringka (2016), gerakan penolakan yang dialami oleh PT SMGP dapat digolongkan sebagai bentuk resistensi, sebagai bentuk perilaku yang berusaha menentang, merusak atau memutar balikkan asumsi, diskursus dan relasi kekuasaan yang dominan (Fringka, 2016). Adapun bentuk resistensi nya bisa dalam bentuk yang aktif dan pasif, secara sembunyi dan terang-terangan sebagaimana penjelasan yang lebih terinci bentuk resistensi terhadap PT SMGP.

Resistensi masyarakat ditunjukkan dapat berupa unjuk rasa, perusakan fisik, maupun perlawanan hukum dari masyarakat. Dalam konteks perubahan, terdapat empat alasan orang yang menolak perubahan menurut Kotter dan Schlesinger (1979), dalam temuan penelitian ini, alasan-alasan penolakan tersebut dikategorikan lebih cenderung mementingkan diri sendiri (Parochial self-test), beberapa orang yang memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya

daripada kepentingan yang lebih besar (Kotter & Schlesinger, 1979). Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk penolakan serta alasan penolakan serta tuntutan yang tidak rasional, propaganda yang tidak benar/bohong/pembodohan, fitnah, menciptakan kondisi yang terancam, intimidasi demi mencapai tujuan tertentu yang dilakukan terhadap PT SMGP.

Namun disisi lain, kita bisa menilai bahwa timbulnya penolakan karena memang perusahaan kalah dalam hal upaya edukasi terhadap proyek dan kehadiran perusahaan dibandingkan dengan propaganda penolakan yang dilakukan sekelompok orang demi kepentingannya tertentu. Hal ini memperkuat penelitian Gozawi (2017) yang menyatakan bahwa kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang rencana dan dampak eksplorasi panas bumi terhadap lingkungan, sehingga sangat mudah terbawa oleh provokasi dan informasi yang keliru yang mempengaruhi emosi seperti menebar ketakutan (Gizawi et al., 2017). Lebih specific lagi, faktor sosial ini dipertajam dalam penelitian Derizal (2017) yang menyatakan bahwa banyaknya penolakan masyarakat disebabkan oleh antara lain ketakutan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan; berpengaruh buruk terhadap nilai dan norma hidup masyarakat; masyarakat merasa tidak akan mendapatkan manfaat langsung; tidak mau ikut dalam sosialisasi; kecurigaan permainan kepentingan kelompok atau elit politik; tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat secara langsung baik dari pemerintah atau perusahaan serta lembaga *independent*; menjaga kepercayaan dan kearifan lokal; masyarakat merasa tidak mengerti mengenai tujuan keberadaan perusahaan dan proyek; adanya sentimen nasionalisme terhadap investasi asing (Derizal, 2017).

Oleh karena itu, hal ini menurut Kotter dan Schlesinger (1979), kesalahpahaman (Mindestag), termasuk kategori ini adalah masalah komunikasi

dan minimnya informasi atau salahnya informasi yang diterima atau terlambatnya informasi yang seharusnya diterima oleh sebahagian besar masyarakat. Sehingga, resistensi itu muncul seiring dengan gerakan gerakan penolakan yang semakin dikumandangkan. Menurut Ubaydillah (2008), walaupun telah dilakukan antisipasi maupun penanganan, resistensi tetap akan ada. Dan pada praktiknya, resistensi PT SMGP ini dapat digolongkan oleh resistensi subyektif-aktif, tidak jelas alasannya secara organisasi atau tujuan pribadi yang ingin dicapai namun bertarung habis-habisan. Hal tersebut sangat terlihat pada penggambaran resistensi terhadap PT SMGP.

Selain itu, resistensi terhadap PT SMGP ini juga bisa dijabarkan melalui teori gerakan sosial Snow (2004 dalam Fringka 2016). Teori ini juga mampu menjelaskan bagaimana masyarakat sebagai suatu kesatuan dengan berbagai alasan dan sebab dapat memobilisasi diri mereka untuk melawan kekuatan yang dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan mereka, yaitu kekuatan korporasi dengan modal yang dimilikinya serta kekuatan pemerintah daerah dengan otoritas kekuasaannya. Snow (2004) mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan kolektif yang terorganisasi dan berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk menentang otoritas institusi (pemerintahan dan negara) maupun kultural (tradisi dan kepercayaan) sehingga dapat disimpulkan bahwa target dari gerakan sosial itu sendiri adalah negara serta otoritas lain dari berbagai institusi seperti korporasi, agama, atau dunia pendidikan (Hidayat, 2012).

Berdasarkan definisi di atas, indikator yang dapat menentukan suatu gerakan dapat dikatakan sebagai gerakan sosial adalah gerakan tersebut merupakan suatu: (1) tindakan kolektif, (2) terorganisasi, (3) memiliki kontinuitas, dan (4) memiliki tujuan (Snow, et al. 2004:6). Lebih lanjut, indikator ini semua terpenuhi sebagaimana penjelasan bentuk bentuk resistensi terhadap PT SMGP. Benford

dan Snow (2000) mengungkapkan bahwa gerakan sosial erat kaitannya dengan konsep Collective Action frame. Frame dibangun untuk memberikan makna dan menginterpretasi kejadian atau kondisi tertentu dalam rangka memobilisasi potensi pengikut, serta untuk mendapatkan dukungan berbagai pihak (Benford, 2000).

Namun, upaya upaya untuk membendung resistensi juga dilakukan PT SMGP. Upaya upaya tersebut antara sosialisasi, studi banding, pelaksanaan kegiatan CSR. Upaya upaya yang dilakukan PT SMGP ini dapat digolongkan sebagai bentuk pendekatan pendidikan dan komunikasi, pendekatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat menurut Kotter dan Schlesinger (1979).

Pada akhirnya, rangkaian rangkaian penolakan dari masyarakat yang tersebar di sejumlah daerah di wilayah areal pengembangan pembangkit listrik panas bumi di Indonesia, termasuk di Mandailing Natal secara bertahap menurun seiring dengan upaya upaya yang dilakukan oleh pihak pengembang dan pemerintah (Hariyadi, 2019).

Pada paragraph sebelumnya, disebutkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh PT SMGP dalam membendung resistensi adalah dengan melakukan kegiatan CSR, salah satunya program pengembangan petani. Bagaimana program pengembangan petani, secara langsung membendung petani agar tidak terprovokasi untuk ikut melakukan penolakan, dan secara tidak langsung memberikan dan membuktikan kesan kepada masyarakat desa terdekat bahwa keberadaan PT SMGP jauh lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Para penerima program, petani, sadar betul bahwa melalui program tersebut merasakan kehadiran perusahaan secara positif.

Lebih lanjut, keberadaan perusahaan, CSR secara umum dan program pengembangan petani secara khusus dalam menghadapi resistensi diperkuat dari

penjabaran dampak positif yang dirasakan masyarakat, yang pada umumnya lebih kepada turut serta mendukung kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan bidang pertanian. Disisi lain, untuk melihat peran program tentu juga bisa melihat manfaat program itu sendiri, berdasarkan temuan lapangan, diidentifikasi bahwa program pengembangan petani secara langsung dirasakan petani dalam upaya peningkatan kapasitas petani, baik itu pengetahuan petani ataupun kemampuan teknis. Selain itu, petani merasakan mendapatkan kepercayaan diri untuk memulai dan melanjutkan usaha pertanian secara berkelompok dan termotivasi ingin memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat atau petani lainnya. Lebih lanjut, melalui program tersebut, petani merasakan kehadiran perusahaan dan merasa mendapat bekal untuk mandiri.

E. KESIMPULAN

Tujuan riset adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat. PT SMGP dalam implementasi CSR nya jelas bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kegiatan intinya dengan berupaya meminimalisir potensi dampak bagi masyarakat, mengakomodir harapan masyarakat yang secara tidak langsung meminimalisir potensi terjadinya konflik dengan masyarakat atau komunitas lokal dalam hal ini beberapa desa yang sudah diidentifikasi PT SMGP dalam desa yang terdampak langsung, desa terdekat terdampak secara tidak langsung. Terfokus kepada program pengembangan petani yang secara umum dijabarkan bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, bentuk pengawasan dan pendampingan serta dukungan yang diberikan perusahaan kepada petani melalui program tersebut. Sehingga dengan adanya program ini secara langsung membendung petani agar tidak terprovokasi untuk

ikut melakukan penolakan, dan secara tidak langsung memberikan dan membuktikan kesan kepada masyarakat desa terdekat bahwa keberadaan PT SMGP jauh lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Para penerima program, petani, sadar betul bahwa melalui program tersebut merasakan kehadiran perusahaan secara positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program ini berperan secara langsung dan tidak langsung dalam upaya meminimalisir partisipasi petani melakukan penolakan kepada perusahaan dengan arti lain berkontribusi mendapatkan keabsahan sosial keberlangsungan aktivitas perusahaan (*license to operate*)

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika FISIP Universitas Indonesia, PT. SMGP dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini, semoga menjadi bacaan yang bergizi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri, A. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi* (1st ed.).

Asian Development Bank. (2020). *Renewable Energy Tariffs and Incentives in Indonesia: Review and Recommendations* (0 ed.). Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS200254>

Badan Kebijakan Fiskal, K. K. (2020). *Optimalisasi BPD LH dalam pengembangan energi terbarukan Di sektor ketenagalistrikan*. 112.

Benford, R. D. S., David A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26(2000), 611–639.

Bolognese, A. F. (2002). Employee Resistance to Organizational Change. *Newfoundations*.

- Dent, E. B., & Goldberg, S. G. (1999). Challenging “Resistance to Change.” *The Journal of Applied Behavioral Science*, 35, 25–41.
- Derizal, T. M. (2017). *Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pada Daerah Penghasil Panas Bumi (Studi Kasus Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lauser, Gunung Sorik Marapi, Gunung Ceremai, dan Gunung Lawu)*. 138.
- Diwasasri, W. (2018). *Analisis Faktor Faktor Penyebab Hambatan Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi di Indonesia tahun 2010—2017*. 158.
- ESMAP, E. (2012). *Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation*. 164.
- Fringka, Y. (2016). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 21(2), 205–231.
- Gizawi, A. S., Ritohardoyo, S., & Haryono, E. H. (2017). Kajian Ekologi Bentanglahan dan Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Eksplorasi Panas Bumi. *Majalah Geografi Indonesia*, 31(1), 1. <https://doi.org/10.22146/mgi.24223>
- Hariyadi, H. (2019). *Penerimaan Sosial Pembangunan Energi Panas Bumi*. 276.
- Hidayat, D. (2012). Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 17(2), 115–133.
- Irena. (2017). *Renewable Energy Prospects: Indonesia*. 14.
- Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (1979). Choosing Strategies for Change. *Harvard Business Review*, 57.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*-Edisi 7.
- Prayogo, D. (2008). *Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal: Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Fisip UI Press.
- Prayogo, D. (2010). Anatomi Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal dalam Industri Geotermal di Jawa Barat. In *Makara: Seri Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Prayogo, D. (2011). *Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas di Indonesia*. Fisip UI Press.
- Prayogo, D. (2013a). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development Pada Industri Tambang dan Migas. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 15, 43–68.

- Prayogo, D. (2013b). *Socially Responsible Corporation*. Fisip UI Press.
- Prayogo, D., & Hilarius, Y. (2012). Efektivitas Program CSR/CD dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Peran Korporasi Geotermal di Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, 17, 1–22.
- Prayogo, D. et. al. (2014). *Guideline for the execution and evaluation CSR programs of mining, oil, and gas Corporation*. Fisip UI Press.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Salemba Empat.
- Zaltman, G., & Duncan, R. (1977). *Strategies for Planned Change*. John Wiley & Sons, Inc.